



BPK RI Harapkan Tata Pemerintahan Kalbar Lebih Baik

PONTIANAK, SP - Anggota VI Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Prof Harry Azhar Aziz mengatakan, dirinya berharap Gubernur Kalbar yang baru bisa membawa Kalbar menuju arah yang lebih baik lagi untuk masal lima tahun mendatang, khususnya dalam upaya meningkatkan IPM Kalbar.

"Apalagi saya dengar tadi gubernur mengatakan untuk IPM Kalbar itu nomor urut 29 dari 34 provinsi, itu terlalu rendah menurut saya," ujar Aziz saat ditemui *Suara Pemred* sesuai mengikuti prosesi Sertijab Kepala BPK Perwakilan Kalbar dari Ida Sundari kepada Joko Agus Setyono yang berlangsung di Aula kantor BPK

RI Perwakilan Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Jumat (7/9) sore.

IPM sendiri kata, Aziz, penilaiannya didasarkan pada tiga variabel pokok yakni kesehatan, pendidikan dan indikator ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non



FOTO BERSAMA - Anggota VI Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Prof Harry Azhar Aziz foto bersama Gubernur Kalbar, Sutarmidji usai prosesi Sertijab Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Jumat (7/9).

• Baca Halaman 15



Hal 9 ■ **bpk ri**

fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purchasing Power Parity Index (PPPI).

“Ketiga variabel ini harus meningkat, baru IPM itu meningkat. Artinya partisipasi orang lulus sekolah itu semakin tinggi, lama hidupnya semakin meningkat, daya beli tidak boleh turun,” kata Aziz.

Oleh karena itu, salah satu kuncinya menurut Aziz adalah kemampuan seorang pemimpin atau kepala daerah, bagaimana ia memperjuangkan itu termasuk di tingkat provinsi, seperti Gubernur mampu memperjuangkan peningkatan IPM ini.

“Caranya bagaimana, ya harus ciptakan lapangan kerja. Anggaran-anggaran itu harus dihitung sedemikian rupa. Tiap rupiahnya harus bisa dihitung dengan cermat, berapa bisa menciptakan lapangan untuk penduduk di Kalbar, itu yang harus dihitung,” imbuhnya.

Aziz yakin Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmidji mampu menuntaskan persoalan tersebut, sehingga nantinya Kalbar bisa menjadi lebih baik dan mampu berdaya saing dengan provinsi lain.

“Saya percaya, karena saya kenal dengan gubernur yang baru ini, Pak Sutarmidji, waktu jadi walikota pernah beberapa

kali berhubungan dengan saya. Saya lihat konsennya dan semangatnya. Mudah-mudahan Kalimantan Barat bisa lebih bagus di masa yang akan datang,” ucapnya.

Selain itu, Aziz juga menyigung dengan menyebutkan bahwa WTP bukanlah satu-satunya syarat atau tolak ukur keberhasilan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan mereka.

“Tidak cukup hanya WTP, sebab itu syarat minimal. Kepala daerah harus tunjukkan berapa angka kemakmuran selama pemerintahannya,” seru Aziz.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar yang baru saja mengakhiri masa jabatannya, Ida Sundari lebih menyoroti persoalan WTP di Kalbar. Ia menyebutkan saat ini setidaknya masih ada empat kabupaten di Kalbar yang belum mendapatkan predikat WTP dan itu menjadi PR selanjutnya bagi kepala BPK RI Perwakilan Kalbar yang baru.

“Kita mempunyai empat kabupaten yang belum WTP, Kita harapkan secara bertahap pimpinan yang baru dapat memberikan pembinaan konsultasi, sehingga yang mendapat opini WTP bisa lebih banyak lagi,” kata Ida.

Sekurang-kurangnya, keempat kabupaten yang belum mendapatkan opini WTP yakni Melawi, Sambas, Bengkayang dan Kayong Utara nantinya bisa memperoleh opini WTP dari BPK RI.

“Namun yang perlu menja-

di catatan seperti yang disampaikan oleh pimpinan pusat tadi, bahwa bukan semata-mata harus diberikan opini WTP, tetapi memang harus dari Pemda-nya sendiri membuat pengelolaan yang baik serta pertanggungjawaban yang baik,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan intruksi dari pimpinan pusat, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar yang baru juga diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP, sehingga dengan demikian bisa diketahui apa saja yang mesti dan harus diperbaiki.

“Adapun rekomendasi-rekomendasi yang ditindak lanjuti, khususnya masalah aset, karena masalah aset ini memang sangat signifikan sekali nilainya dan itu mempengaruhi opini,” ucapnya.

Ida juga menyampaikan harapannya kepada pimpinan yang baru untuk melanjutkan zona integritas yang telah ia bangun. Zona ini, kata Ida harus terus diperjuangkan agar Kalbar bisa memperoleh predikat bebas dari korupsi.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa disurvei oleh Menpan dari pusat, melihat sejauh mana kinerja BPK itu sendiri. Mudah-mudahan predikat itu bisa diperoleh. Itu harapan saya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar yang baru, Joko Agus Setyono menyatakan komitmennya untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh pendahulunya.

“Saya melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh bu Ida, sebagai kepala perwakilan sebelumnya. Komitmen saya adalah membagun Kalbar dari unit kerja yang saya bidangi, itu intinya. Jadi mari kita sama-sama, baik itu masyarakat umumnya, BPK dan instansi lainnya termasuk kepala daerah mari kita sama-sama bekerja dengan baik,” ajak Agus.

Terkait persoalan yang ada dan mungkin harus segera menjadi PR bagi pihaknya, Agus mengatakan dirinya akan mengincludekannya terlebih dahulu. Apa-apa saja permasalahan untuk kemudian didiskusikan diinternal.

“Hasilnya mungkin kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan mereka (Pemda). Kita harus selalu berkomunikasi dengan para pimpinan daerah, dan harus selalu menjalin komunikasi agar tata kelola keuangan daerah itu terjaga, transparan dan akuntabel,” katanya.

Terkait zona integritas yang sudah dibangun oleh Kepala BPK Perwakilan Kalbar yang sebelumnya, Agus menyebutkan itu juga bukan hal yang mudah dan bersifat jangka panjang.

“Ini jangka panjang, *ndak* bisa dibangun dalam waktu yang pendek. Kita harus membangun diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum kita membangun orang lain. Kita harus lihat apa kekurangan-kekurangan, zona integritas itu kan arahnya wilayah bebas korupsi. Tapi yang jelas itu jadi komitmen kita,” pungkasnya. **(nak/bob)**